

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini berjudul Penerapan Fungsi Legislasi DPRD Sleman dalam Menjalankan Otonomi Daerah Tahun 2014 - 2015. Berdasarkan dari judul tersebut latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah penerapan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sleman pada tahun 2014-2015. DPRD adalah salah satu lembaga institusi yang menunjukkan pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung. Harapan ke arah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRD diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi perwakilan erat kaitannya dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain. Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sedangkan yang berfungsi sebagai badan eksekutif adalah pemerintah daerah dan yang berfungsi sebagai badan legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi dan tidak boleh saling mengintervensi. Termasuk dalam membuat kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam kenyataannya, tugas dan wewenang DPRD belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satu contohnya adalah faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dari para dewan di DPRD tersebut. Mereka berangkat dari berbagai macam latar belakang pendidikan. Faktor kemalasan dan kurangnya disiplin serta tanggung jawab pribadi sebagai wakil rakyat membuat tingkat kepercayaan masyarakat luas menjadi berkurang. Hal ini terbukti bahwa hampir semua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Sleman berasal dari Pemerintah Daerah dan masih sedikit/jarang Raperda yang berasal dari anggota DPRD.